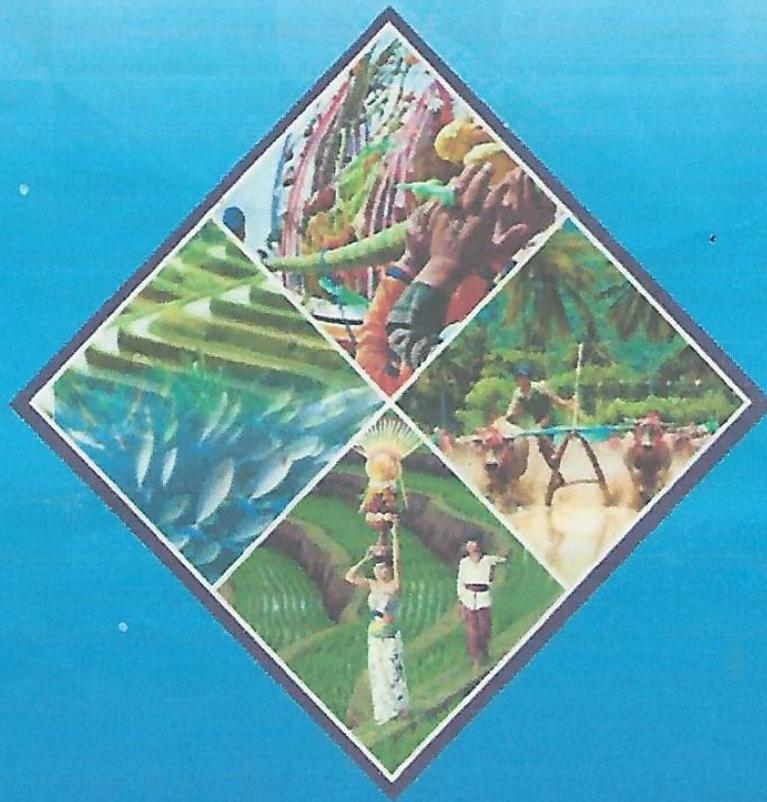




# Konferensi Nasional Penyuluhan & Komunikasi Pembangunan



30-31 Agustus 2016



Tahun 2016

# **The Contestation of Religious Counseling on the Agenda of National Development: Case Study of Yogyakarta City**

Hasan Sazali

Lecture of Development Communication in Islamic State University of North Sumatera

Email: sazalihasansazali.ma@yahoo.co.id

## **Abstract**

The process of development on a state needs participation of citizen, including the role of religious counselor. Social changes that occur in the society are desirable, positive, useful, intended, and planned conditions. The objective of this study is to examine the role of religious counselor in delivering the messages of development. This study takes place in the city of Yogyakarta. The methods of this study use qualitative approach, critical analysis, and statistic. The result of this study shows that in the context of quality, religious counselors are so strategic both of in delivering religious mission and development mission. However, this study shows that the role of religious counselors in the city of Yogyakarta is quite low in delivering messages of development. Therefore, active role of religious counselors is needed in putting messages of development in religious activities in order to make process of national development run effectively in the society.

Keywords: *religious counselor, active role, strategic, message of development and agenda of national development*

## **Kontestasi Penyuluh Agama dalam Agenda Pembangunan Nasional: Studi Kasus di Kota Yogyakarta**

Hasan Sazali

Dosen Komunikasi Pembangunan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
email: sazalihasansazali.ma@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Proses pembangunan suatu negara membutuhkan peran serta aktif segenap warga masyarakat, tidak terkecuali peran penyuluh keagamaan. Perubahan sosial masyarakat yang berlangsung merupakan keadaan yang diinginkan, bersifat positif, bermanfaat, dan ditimbulkan serta direncanakan. Kajian ini bertujuan melihat peran penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis kritis dan statistik. Hasil kajian menyatakan bahwa secara kualitas penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Namun disisi lain, kajian ini mendapatkan bahwa peran penyuluh agama di Kota Yogyakarta, dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan masih relatif lemah. Oleh karena itu perlunya peran aktif penyuluh agama dalam memasukan pesan-pesan pembangunan dalam setiap kegiatan dakwahnya, agar proses pembangunan secara nasional, bisa sampai secara efektif di masyarakat

Kata Kunci: *penyuluh agama, peran aktif, strategis, pesan pembangunan dan agenda pembangunan nasional*

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pembangunan agama sebagai bagian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional harus mampu menciptakan sinergi dengan pembangunan di bidang lainnya. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025, bahwa pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Kota Yogyakarta dengan visi pembangunan “Terwujudnya kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan”. Kota Yogyakarta merupakan Kota pendidikan dengan tingkat pluralitas yang cukup tinggi baik dari aspek agama maupun etnis, sehingga timbul suatu pertanyaan, apa yang menyebabkan Kota Yogyakarta relatif “aman” dalam kehidupan sosial keagamaan? Sehingga predikat *City Of Tolerance* sebagai salah satu predikat yang disandangnya. Sazali (2016) Begitu juga dengan agenda pembangunan pada aspek yang lain, terkadang menjadi agenda tugas yang di lakukan oleh penyuluh agama di lapangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam membangun harmonisasi kehidupan keberagaman di Kota Yogyakarta, begitu juga dalam menyampaikan agenda pembangunan nasional. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran penyuluh agama dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama di Kota Yogyakarta ?
2. Apa yang menjadi agenda, dalam kinerja penyuluh agama di Kota Yogyakarta dalam menyampaikan agenda pembangunan nasional ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan agenda pembangunan nasional khususnya harmonisasi kehidupan beragama di Kota Yogyakarta?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini:

1. Menganalisis peran penyuluh agama dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama di Kota Yogyakarta.
2. Menganalisis agenda kinerja penyuluh agama dalam menyampaikan agenda pembangunan nasional.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan agenda pembangunan nasional khususnya harmonisasi kehidupan beragama di Kota Yogyakarta

## **METODE PENELITIAN**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014: 24) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan “makna” dari pada “generalisasi”

Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara universal, detail, mendalam, yang terpenting dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan pemaparan secara mendalam tentang ucapan, tulisan, perilaku, yang dapat diamati dari setiap individu, kelompok dan masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian dalam konteks tertentu dan fokus pada batasan yang menjadi fokus penelitian dan hal ini dianalisis secara utuh, komprehensif dan holistik.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Creswell (2010: 20) Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan atau suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Yin (2015: 1)

Untuk mendapatkan hasil temuan analisa yang dalam dari penelitian ini, akan dilakukan format deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus. Studi kasus memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Analisis data di dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan dan penjelasan empiris untuk melengkapi penjelasan teori yang digunakan. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan proses analisa data di dalam penelitian ini. Pertama, berupaya menemukan tema “tentatif” yang muncul dari topik-topik pembicaraan dengan informan, dengan cara memilah informasi yang sudah didapatkan. Kedua *key informan* tidak dibatasi oleh suatu konsep tertentu, akan tetapi tetap fokus pada informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan petunjuk yang ada secara detail, dikarenakan hal ini memudahkan dalam proses pengkodean data. Langkah kroscek ini dilakukan melalui komentar responden dan *key informan* yang berbeda dalam menggali validitas informasi. Kemudian data di kroscek berdasarkan kategorisasi kepentingan penelitian. Dalam kroscek data dikaji dan diminta dari responden dan kemudian diuji silang dengan responden lain. Kroscek dilakukan untuk memperkecil subjektivitas dan meningkatkan objektivitas penelitian. Di samping itu hasil kroscek data yang telah didapatkan perlu direduksi dan dimasukkan dalam pola, kategori, fokus sesuai dengan permasalahan.

Hasil reduksi data tersebut perlu di *display* tertentu. Hal ini dilakukan agar masing-masing pola, kategori, fokus dengan tema yang akan dipahami tentang substansi persoalannya dapat disimpulkan dengan interpretasi pemahaman yang baik. Melalui proses kroscek siklus inilah diharapkan konstruksi temuan penelitian dapat dibuat dengan baik, dengan memiliki landasan pengambilan kesimpulan yang kuat. Untuk lebih melengkapi data supaya lebih komprehensif pada beberapa karakteristik dilakukan kuantifikasi prespektif statistik.

## **PEMBAHASAN**

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Pemerintahan Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 kelurahan. Filosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun ‘*image*’ Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakarta memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. (RKPD Kota Yogyakarta 2015)

Kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2014 diarahkan pada tema: “Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Wilayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Semangat “*Segoro Amarto*” dilandasi maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, potensi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan jumlah pemeluk agama pada saat ini berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 413936, mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2014 sebanyak 341548. Dengan jumlah penduduk umat bergama sebesar 413936, pihak Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki 32 penyuluh agama yang tersebar di seluruh kawasan Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, di mana tugas penyuluh agama ini melakukan pembinaan dalam kehidupan umat beragama. Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki sasaran pembangunan agama antara lain; Meningkatnya

pemahaman dan pengalaman agama serta toleransi yang harmonis dan dinamis, intern, antar umat beragama dalam pemerintah.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Agama

NO	Kecamatan	Agama (Orang)						
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Kepercayaan
1	Tegal Rejo	29941	3117	3794	36	73	4	1
2	Jetis	20941	2718	4073	23	171	12	1
3	Gondokusuman	32266	5499	4982	114	125	2	5
4	Danurejan	17723	1380	2337	20	73	3	2
5	Gedongtengen	16148	1743	2902	32	228	3	2
6	Ngampilan	15998	1068	1645	41	89	0	0
7	Wirobrajan	25503	1188	3970	37	62	1	0
8	Mantrijeron	29709	1432	4363	34	79	0	2
9	Kraton	19066	626	2786	22	1	0	1
10	Gondomanan	11274	1763	2115	14	243	0	0
11	Pakualaman	8476	682	1625	32	33	0	0
12	Mergangsan	26966	1987	2933	61	65	1	2
13	Umbulharjo	59784	2885	4793	72	98	0	0
14	Kota Gede	30753	907	1106	27	22	0	0
Jumlah		341548	26995	43424	565	1362	26	16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (2014)

Pembangunan agama sebagai bagian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional harus mampu menciptakan sinergi dengan pembangunan di bidang lainnya. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahwa Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Sesuai dengan lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2003 Bab III dijelaskan penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Tugas pokok penyuluh agama sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/kep/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama. Atas dasar hukum itulah peneliti melihat begitu luasnya aspek kerja yang menjadi tugas pokok para penyuluh agama di tanah air tanpa terkecuali di Kota Yogyakarta.

Tabel 2. Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

NO	Nama	Unit Kerja
1	Nur Akhmad,S.Ag.,M.A.	Penyuluh Agama Islam Ngampilan
2	Kusmanto,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Umbul Harjo
3	Hj.Rita Maisyaroh,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Mantrijeron
4	Sutarjo,S.Ag.,MA	Penyuluh Agama Islam Kota Gede
5	Muntholib	Penyuluh Agama Islam Pakualaman
6	Aminuddin,S.Ag,M.Si	Penyuluh Agama Islam Tegal Rejo
7	Karmin,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Mergangsan

8	Muhmammad Makhilani,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Jetis
9	Fahrur Rozi,Sthi	Penyuluh Agama Islam Gondokusuman
10	Suryana,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Gedongtengen
12	Arini Nurhayati,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Keraton
13	Janti Ristiani,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Gondomanan
14	H.Solehudin,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Umbulharjo
15	Samsul Ma`arif,S.Thi	Penyuluh Agama Islam Danurejan
16	Muhammad Da`i, S.Ag	Penyuluh Agama Islam Wiroberajan
17	Suprpto,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Mantrijeron
18	Margianto,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Tegalrejo
19	Suhartanto,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Gedongtengen
20	Muchrimah,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Kotagede
21	Siti Da`imah,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Tegalrejo
22	Eko Agus Wibowo,S.Sos.I	Bimas Islam Kota Yogyakarta
23	Mujiarto,S.Sos.I	Penyuluh Agama Islam Mergangsan
24	Eman Suherman S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam Gondomanan
25	Endro Dwi Widodo,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Wiroberajan
26	Solihat,S.HI	Penyuluh Agama Islam Gondokusuman
27	Felicitas Maria Fadhari.S.Ag	Penyuluh Agama Katholik Kota Yogyakarta
28	Carolus Baromeus Ismulyadi,SS	Penyuluh Agama Katholik Kota Yogyakarta
29	Erica Evi Yanti,S.PAK	Penyuluh Agama Keristen Kota Yogyakarta
30	Tri Didik Wibowo Adi,M.Th	Penyuluh Agama Keristen Kota Yogyakarta
31	Totok,S.Ag	Penyuluh Agama Buddah Kota Yogyakarta
32	Agus Tri Harjo Purnomo,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Kota Yogyakarta

Sumber . Kemenag Kota Yogyakarta 2015

Tugas penyuluh agama tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera Purwanto (2012). Posisi penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya dalam memecahkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi dalam kehidupannya”. Beberapa sektor agenda pembangunan nasional yang menjadi agenda kerja penyuluh agama di Kota Yogyakarta: Sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi dan sektor kebudayaan.

“Penyuluh agama juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Selain itu juga penyuluh agama sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan. Karena ia menjadi motivator pembangunan, peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya dilaksanakan secara bersama. Demi suksesnya pembangunan penyuluh agama berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan” Purwanto (2012).

Secara umum kehidupan dan pergaulan umat di Kota Yogyakarta berbagai agama tampak rukun. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak pernah terjadi ketegangan atau persinggungan satu sama lain. Ketegangan dan persinggungan itu wajar dalam suatu masyarakat yang beraneka. Sebab bagaimanapun juga dalam masyarakat majemuk mesti terdapat persaingan, dan justru dalam persaingan itu terdapat dinamika. Walaupun ketegangan dan persinggungan itu dianggap wajar, namun suatu ketika bisa terjadi peruncingan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain, masalah penyiaran agama, warisan penjajahan serta masalah kompleks mayoritas dan minoritas yang terdapat dimasyarakat. Penyebaran agama adalah hal yang wajar dan semestinya. Agama Islam dan Keristen sangat mementingkan hal ini. Para pemeluknya menanggung kewajiban agama untuk itu Effendi (2013: 64)

Penyuluh agama memiliki peranan yang besar dalam membangun kerukunan umat beragama. Apalagi melihat fenomena keberagaman, dan hubungan interaksi masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi, menjadi

satu tantangan yang besar bagi penyuluh agama di lapangan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh penyuluh agama kita saat ini? Apa yang penyuluh agama lakukan dalam membangun penguatan toleransi agama pada masyarakat. Setidaknya dua pertanyaan mendasar ini bisa digunakan sebagai kerangka acuan untuk menganalisis, mengenai penguatan toleransi agama yang sudah dilakukan oleh para penyuluh agama, khususnya di Kota Yogyakarta.

Penyuluh agama di Kota Yogyakarta sebahagian besar berpendidikan S1, dari 32 jumlah penyuluh agama terdapat 28 penyuluh S1 dan 4 penyuluh berpendidikan S2. Latar belakang pendidikan S1 penyuluh agama adalah sarjana hukum Islam (Fakultas Syariah dan Hukum Islam) yang semestinya untuk menjadi penyuluh agama harus dari latar belakang Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan keahlian Bimbingan Penyuluhan Islam dan Komunikasi Penyiaran Islam, kalau dia penyuluh agama Islam. Secara teknis peneliti menganalisis banyak kendala dalam proses penyampaian pesan-pesan pembangunan yang disampaikan oleh penyuluh agama di lapangan, belum lagi persoalan kompetensi isi materi pesan yang akan disampaikan. Untuk masa kerja penyuluh agama di kota Yogyakarta sebahagian besar telah bertugas 6-10 tahun. Penyuluh agama Kota Yogyakarta didominasi oleh laki-laki, dari jumlah keseluruhan penyuluh agama yang ada penyuluh laki-laki berjumlah 71,88%. Kondisi ini pada dasarnya dapat menjadi perhatian pemerintah untuk melihat tingkat efektivitas keberhasilan peran penyuluh agama di lapangan. Dari hasil observasi dan penelitian yang dilakukan dalam melihat kondisi objektif penyuluh agama, sebahagian besar penyuluh agama banyak berhadapan dengan perempuan selaku anggota masyarakat yang disuluh ketimbang laki-laki. Sehingga sangat menyulitkan bagi para penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan apalagi sesuatu yang berkaitan dengan informasi-informasi pembangunan. Selain institusi lembaga pemerintah seperti lembaga pemasyarakatan (Lapas), kantor-kantor instansi pemerintah, rumah sakit, dan posyandu lansia pada dasarnya penyuluh agama sebahagian besar lebih banyak berhadapan langsung dengan masyarakat. Konstruksi budaya terhadap keberadaan penyuluh agama perempuan tidak bisa dilepaskan dalam proses kinerja penyuluh agama di lapangan.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
S1	28	87,5
S2	4	12,5
Jumlah	32	100

Tabel 4 Latar Belakang Jurusan Pendidikan S1 Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

Latar Belakang Pendidikan S1	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Sarjana Fak. Dakwah (BPI, KPI)	7	21,88
Sarjana Akidah Fil /P.Agama	4	12,5
Sarjana Ushuludin Tafsir Hadis	2	6,25
Sarjana Kebudayaan Islam	1	3,12
Sarjana Pendidikan Agama Islam	3	9,38
Sarjana Pendidikan Bahasa Arab	1	3,12
Sarjana Hukum Islam	9	28,12
Sarjana Filsafat Theologi	1	3,12
Sarjana Pendidikan Agama Kristen	2	6,25
Sarjana Filsafat Buddah	1	3,12
Sarjana Hukum	1	3,12
Jumlah	32	100

Tabel 5 Masa Kerja Penyuluh Agama Kota Yogyakarta

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1-5	0	0
6-10	22	68,75
11-15	8	25,00

16-20	1	3,12
21-25	1	3,12
Jumlah	32	100

Dari beberapa pengamatan yang dilakukan dalam perkembangan FGD sesama penyuluh agama, sesama penyuluh yang berbeda agama, masih terkesan kaku ketika mereka memulai dalam melakukan proses interaksi. Salah satu faktor penyebabnya, dikarenakan sesama penyuluh agama dalam satu unit kerja mereka jarang terlibat interaksi, apalagi semacam pelatihan bersama terkait tentang konsep-konsep multikultural, pluralisme, toleransi agama. Ketika ditanyakan secara jujur mereka menganggap bahwa itu suatu yang penting yang harus mereka kuasai. Salah satu penyebabnya adalah sistem kerja yang dibangun oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengkondisikan mereka untuk saling tidak berinteraksi, hal ini diawali dengan ruang kerja yang terpisah, antara sesama penyuluh agama. Kondisi ini seharusnya tidak seperti itu, mereka seharusnya berinteraksi diawali dengan hal-hal yang sederhana, kemudian meningkat kepada persoalan yang secara kebetulan memiliki posisi fungsional yang sama. Begitu juga dengan forum-forum pertemuan yang digagas oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta, mereka sesama penyuluh agama memiliki jadwal agenda yang berbeda. Selama beberapa tahun, mereka baru dipersatukan dalam forum diskusi yang pada waktu penelitian ini dilakukan.

Pada saat ini, penyuluh agama di Kota Yogyakarta memiliki tantangan yang besar, berkembangnya paham-paham radikalisme ditengah-tengah masyarakat. Faham radikalisme berbau agama maupun politik. Belum lagi persoalan aliran-aliran faham keagamaan yang banyak menyimpang dari substansi ajaran agama. Informasi-informasi yang berbau fitnah dengan mengatas namakan kelompok agama tertentu, atau aliran tertentu. Kita ketahui bahwa Kota Yogyakarta merupakan miniaturnya Indonesia. Tempat berkumpulnya para cendekiawan muda dari berbagai penjuru tanah air. Maka dari itu, Kota Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi tempat berkembangnya berbagai macam aliran-aliran agama. Kondisi ini didukung dengan nilai-nilai budaya masyarakat asli Kota Yogyakarta, yang selalu menerima dengan sesuatu hal yang berbeda, mereka beranggapan bahwa semua itu tidak menjadi persoalan ketika seluruh kelompok dengan berbagai latar belakang perbedaan tersebut mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan dalam melakukan hubungan interaksi.

Pada kondisi ini, peran penyuluh agama, makin terlihat khususnya dalam peranan membangun harmonisasi kehidupan beragama. Peranan itu sesungguhnya bukan monopoli satu individu atau satu kelompok, selama ini yang terjadi di wilayah kerja penyuluh agama Kota Yogyakarta seperti itu. Pada dasarnya sudah banyak yang dilakukan oleh penyuluh agama yang ada di Kota Yogyakarta, akan tetapi tingkat keberhasilan yang mereka lakukan belum dimonitoring dan dilakukan evaluasi secara mendalam, walaupun ada evaluasi, monitoring kinerja yang mereka lakukan hanya sebatas pemenuhan tugas administrasi. Ini muncul ketika perdebatan dalam forum FGD yang dilakukan, mereka beralasan, beban tugas yang diberikan kepada mereka sudah terlalu banyak

Pembenaran secara sepihak dari klaim kebenaran teks sumber ajaran agama, pada proses selanjutnya membawa pada sudut pandang kebenaran agama secara sempit. Pada gilirannya proses ini memunculkan semangat keagamaan dengan meyalahkan kebenaran agama umat lain, sehingga tidak ada ruang dialog, ketika aspek kebenaran agama yang dilihat dalam persepektif theologi. Hal ini menjadi pekerjaan yang besar bagi para penyuluh agama yang ada di Kota Yogyakarta. Klaim kebenaran tidak hanya terjadi dalam internal komunitas agama Islam, tetapi juga terdapat dalam komunitas agama lainnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, klaim kebenaran juga terasa bagi sesama penyuluh agama, apalagi ketika dilontarkan isu yang terkait dengan fatwa MUI mengenai ucapan "selamat" kepada umat yang sedang mengucapkan natal. Materi ini menjadi suatu pengamatan yang menarik untuk diamati lebih jauh.

Peranan dalam melakukan penyuluhan pada aspek keberagaman agama yang dilakukan oleh para penyuluh agama yang ada di Kota Yogyakarta, kurang berhasil, walaupun pada aspek yang lain sudah banyak materi-materi pembangunan yang mereka sampaikan kepada masyarakat, akan tetapi pada aspek toleransi agama, dalam membangun harmonisasi kehidupan umat beragama masih belum terlihat. Salah satu yang bisa dijadikan indikator dalam menganalisis aspek ini adalah, sesama penyuluh agama, mereka masih memiliki rasa kecurigaan, kondisi ini muncul karena tidak adanya media yang membuat mereka untuk selalu berinteraksi. Secara kompetensi banyak aspek yang belum mereka kuasai terkait dengan persoalan toleransi agama. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, untuk mengukur kinerja keberhasilan para penyuluh agama di lapangan. Serta perlu meredefenisi kembali

pengertian penyuluh agama, agar tugas dan fungsi mereka lebih fokus dalam membangun harmonisasi peradaban masyarakat dalam hubungan antar dan inter agama.

Pada sektor pembangunan yang lain penyuluh agama di Kota Yogyakarta juga belum berhasil, sektor kesehatan yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini, sektor ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa rumah sakit, posyandu lansia yang ada di tingkat RW dan RT pada beberapa wilayah yang ada di Kota Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh para penyuluh agama, dan ini menjadi bagian dari salah satu agenda kerja yang sudah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kompetensi penyuluh agama yang sebahagian besar dengan latar belakang sarjana agama, secara teknis mendapat kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan pada sektor kesehatan, apalagi ketika masyarakat yang disuluh mempertanyakan persoalan-persoalan teknis yang menyangkut dengan materi kesehatan. Walaupun penyuluh agama porsinya hanya pada tataran penyampaian informasi terkait dengan sektor kesehatan.

Secara teknis penyuluh agama Kota Yogyakarta sering dilibatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam berbagai agenda pembangunan pada sektor kesehatan, misalnya penanggulangan penyebaran HIV AIDS, penanggulangan wabah demam berdarah, sosialisasi kesehatan reproduksi. Akan tetapi secara tingkat keberhasilan dilapangan dalam penyampaian pesan pembangunan khususnya pada sektor kesehatan ini dapat dikatakan masih reaktif lemah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, terkait dengan kontestasi penyuluh agama dalam agenda pembangunan nasional, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyuluh agama di Kota Yogyakarta peranan yang mereka lakukan dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama masyarakat masih lemah. Kondisi ini disebabkan oleh begitu luasnya ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap penyuluh agama.
2. Pada sektor pembangunan kesehatan, penyuluh agama kurang memiliki kompetensi pada sektor ini, sehingga peranan yang dilakukan juga masih lemah. Kendatipun tugas penyuluh agama hanya sebatas dalam kapasitas menyampaikan terkait pembangunan pada sektor kesehatan
3. Pemerintah seharusnya meredefenisi kembali tentang eksistensi penyuluh agama dalam konteks pembangunan, kondisi ini diawali dari pengertian penyuluh agama.
4. Penyuluh agama sebaiknya fokus dalam sektor pembangunan agama, sebagai tugas pokok. Terutama dalam membangun harmonisasi kehidupan umat beragama untuk menjadi lebih baik. Begitu juga dengan meningkatkan kapasitas kompetensi penyuluh agama secara keilmuan pada sektor ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Agama R.I, 2010. *Perencanaan Program dan Anggaran Departemen Agama*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2010. *Lampiran Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM (2010-2014)*

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-21.LT.02.01 Tahun 2011, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama* Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanl Republik Indonesia

Lubis, M, R., 2010, *Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*. Jurnal Harmoni. Volume IX, No.34 April 2010. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal. 21-40

Purwanto, A., 2012. *Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Umat*. <http://anis-purwanto.blog>. diakses tanggal 6 November 2015

Sazali, H., 2016, *Penguatan Toleransi Agama dalam Komunikasi Pembangunan Agama, Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor dan Yogyakarta*. Disertasi. Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Nasioanal Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya, 2010,. Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid. Kanwil Departemen Agama Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Yin. K. R., 2015, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Cetakan ke 14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Creswell Jhon W, *Research Design, Qualitative, Quantitaive, Mixe Methods Approaches*, edisi Terjemahan, *Reseach Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 2010, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono., 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cetakan ke 2. Alfabeta. Bandung.
- Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), 2015.. Pemerintahan Kota Yogyakarta.